

**IMPLEMENTASI ATURAN ETIKA BERPAKAIAN
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI PADANG
(Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas
Ekonomi)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :
FITRI LAILI
1106446 - 2011**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

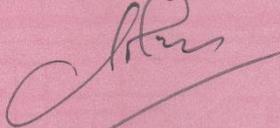
Judul : Implementasi Aturan Etika Berpakaian Di Lingkungan
Kampus Universitas Negeri Padang (Studi Kasus
Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Fakultas Ekonomi)

Nama : Fitri Laili
NIM : 1106446
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Yasril Yunus, M.Si

NIP. 195310171982111002

Pembimbing II



Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D

NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

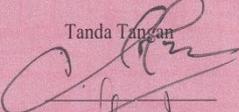
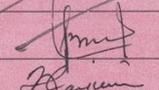
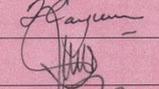
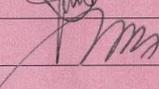
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2015 pukul 10.00-12.00 WIB

IMPLEMENTASI ATURAN ETIKA BERPAKAIAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI PADANG (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi)

Nama : Fitri Laili
NIM/TM : 1106446/2011
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Sekretaris : Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D	
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Anggota : Drs. Syamsir M.Si, Ph.D	
Anggota : Afriva Khaidir MAPA. Ph.D	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP: 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Fitri Laili: (2011-1106446). Implementai Aturan Etika Berpakaian di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Padang (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (studi kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi). Penelitian ini dilatar belakangi dengan melihat masih banyak mahasiswa yang tidak mematuhi aturan berpakaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, masih belum merata penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar aturan etika berpakaian, beragamnya peraturan etika berpakaian dari beberapa Fakultas, masih banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berpakaian ketat baik celana maupun baju yang sesuai dengan *lifestyle* jaman sekarang, dan tidak semua dosen memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, melaksanakan kebijakan penerapan etika berpakaian di lingkungan kampus belum terlaksana dengan baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini hanya berusaha membuat deskripsi dan menggambarkan tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara metode/teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan pada orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah Pembantu Dekan III, Pembina HIMA, Dosen, Karyawan, Beberapa anggota BEM, Mahasiswa. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Alat pengumpul data dibantu dengan pedoman wawancara, observasi serta menggunakan buku yang relevan. Teknik menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang masih belum terlaksana dengan baik, dilihat dari masih ada mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kampus Universitas Negeri Padang, kemudian faktor yang menjadi sebuah penghambat dalam pelaksanaan peraturan berpakaian di lingkungan kampus adalah faktor lingkungan baik dari luar maupun dari dalam, seperti masih banyak mahasiswa yang berpakaian hanya sesuai dengan trend yang ada kemudian masih kurangnya partisipasi dari dosen dalam menerapkan aturan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan aturan berpakaian di lingkungan kampus dan yang menjadi pendukung dalam penerapan aturan berpakaian komunikasi antara pihak yang membuat kebijakan dan pihak yang menjadi pelaksana kebijakan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Aturan Etika Berpakaian Di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Padang (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yasril Yunus, M,Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Ibuk Dra. Hj Fitri Eriyanti, M.Pd.Ph.D sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M,Si. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D dan Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Teristimewa buat kedua orang tuaku Bapak Nusyirwan dan Ibu Eni Fitri Yeni yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	9
B. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	37
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
E. Uji Keabsahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus	51
C. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn ..	22
Gambar 2. Model Implementasi Edward III	27
Gambar 3. Kerangka Konseptual	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara.....
Lampiran 2	Surat Tugas Pembimbing.....
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial.....
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi.....
Lampiran 5	Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan.....
Lampiran 6	Aturan berpakaian sesuai keputusan Rektor.....
Lampiran 7	Aturan berpakaian Fakultas Ilmu Sosial
Lampiran 8	Aturan berpakaian Fakultas Ilmu Pendidikan.....
Lampiran 9	Aturan berpakaian Fakultas Ekonomi.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri masyarakat selalu mengalami transformasi dari waktu ke waktu, tidak ada masyarakat satupun yang mempunyai potret yang sama. Apabila dicermati pada waktu yang berbeda, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, meskipun dengan laju perubahan yang bervariasi.

Gaya merupakan satu hal penting yang sangat diperhatikan oleh kaum remaja saat ini, karena dengan gaya mereka bisa menunjukkan siapa sebenarnya mereka dan mengekspresikannya lewat pakaian yang mereka kenakan. Mereka bisa dengan mudah mengubah penampilan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Keadaan seperti ini tidak bisa terlepas dari adanya arus modernisasi yang telah masuk ke Indonesia.

Ketika berbicara tentang busana atau pakaian, maka akan terbayang mode, karena pakaian dan mode satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apalagi di zaman modern saat ini, begitu banyak mode pakaian sudah diciptakan, mulai yang sempit sampai yang sangat longgar, mulai dari bahan yang sangat sederhana sampai bahan yang sangat mahal, baik untuk kaum Adam maupun kaum Hawa. Terutama untuk kaum Hawa, gaya berbusana dianggap hal yang sangat penting di zaman sekarang. Mulai dari mode yang terbuka menampakkan aksesoris, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan lekuk tubuhnya sampai kepada mode yang sangat tertutup.

Etika berpakaian merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berpakaian dan berdandan, mahasiswa sebagai insan akademik hendaknya membiasakan diri supaya berbusana yang mencerminkan nilai-nilai etis, estetika, religius, sehingga menampilkan keberadaannya sebagai civitas akademik yang sopan dan berbudaya. Terutama masyarakat Sumatera Barat yang terkenal dengan falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” dituntut mampu untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini haruslah mampu di implementasikan oleh Universitas yang berada di Sumatera Barat.

Universitas Negeri Padang merupakan salah satu Universitas yang berada di Sumatera Barat yang memiliki semboyan kampus intelektual dan religius yang mampu menghasilkan mahasiswa yang intelektual dan religius. Religius dalam hal ini tidak hanya keimanan tetapi juga dalam hal bertingkah laku dan berpakaian. Universitas Negeri Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi Universitas unggul di kawasan Asia Tenggara dibidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Sebagai sarana pendidikan Universitas Negeri Padang merupakan wadah yang membentuk karakter mahasiswanya. Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pendidik maupun non pendidik haruslah memiliki nilai-nilai moral dan kesopanan.

Mahasiswa pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan yang akan menjadi generasi penerus Bangsa dan membangun Bangsa dan tanah air ke arah yang lebih baik. Mahasiswa dituntut untuk memiliki karakter yang mencerminkan Bangsa Indonesia. Etika bagi mahasiswa dapat menjadi alat kontrol dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, makna etika harus lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam lingkungan mahasiswa.

Seiring dengan perkembangan jaman, sebagian besar mahasiswa banyak terpengaruh dengan pergaulan dan budaya yang berkembang saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat gaya hidup mahasiswa lebih banyak meniru gaya hidup ala barat. Hal ini sangat mempengaruhi cara berpakaian mahasiswa yang merupakan kaum intelektual.

Universitas Negeri Padang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Visi Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi Universitas unggul di kawasan Asia Tenggara dibidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Di dalam materi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru yang diterbitkan oleh UNP (2008:47) menyebutkan perlu adanya aturan yang dapat menjadi acuan atau pedoman dalam cara berpakaian sebagai seorang mahasiswa. Pada tahun 2011 telah dibuat aturan etika berpakaian sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 119/UN35/A/2011 pada tanggal 1 juli 2011 dalam pasal 11 Huruf g dan h yang menetapkan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus.

“g. mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku demi terbinanya suasana belajar dan mengajar yang kondusif, sedangkan h. Berpakaian rapi, sopan, dan tidak ketat sesuai dengan nilai dan normayang berlaku dalam mengikuti proses pembelajaran dan di lingkungan kampus”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dotik Asmayenti (2012) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Etika Berpakaian (Studi Mahasiswa Ilmu Sosial Politik FIS UNP) dalam penelitian tersebut diketahui pelaksanaan etika berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik, berdasarkan keputusan jurusan No. 705/H35.1.6.1/TU/2009. Tentang Pelaksanaan Etika Berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik ada tiga kategori yang pertama adalah kelompok mahasiswa yang mematuhi, ada atau tidak ada peraturan dengan penuh kesadaran dalam menjalankannya. Yang kedua adalah kelompok yang mematuhi setengah-setengah, seperti mereka mematuhi bersifat kondisional, membawa rok cadangan. Kelompok yang ketiga mahasiswa belum mematuhi.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Wewenki Sanusi yang di posting pada Blog nya www.alenta_we2nkisanusi.blogspot.com pada tanggal 13 April 2015 berjudul Etika Berpakaian Islam, yang berisi tentang beberapa hikmah yang didapat wanita jika berpakaian sesuai dengan ajaran Agama Islam. Salah satunya kehormatan wanita tersebut terjaga.

Teori Etika menurut Immanuel Kant (K. Bertens, 2004:244) adalah kehendak harus otonom bukan heteronom, jika dilihat usia mahasiswa termasuk pada tingkat otonomi moral, yaitu bisa berfikir abstrak, untuk menentukan mana yang baik dan juga dilihat dari peraturan yang ditetapkan.

Sesuai dengan keputusan Rektor yang menetapkan aturan berpakaian, Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Negeri Padang dirasa telah melakukan sosialisasi dengan baik, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi yang telah memasang baliho di sekitaran Fakultas dan memberikan selebaran kepada mahasiswa, tetapi peraturan nya belum ada SK. Ada juga

beberapa Fakultas yang membagikan buku saku terhadap mahasiswa baru, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial. Sosialisasi lain juga dilakukan oleh beberapa Fakultas dengan cara memberikan orientasi kepada mahasiswa baru.

Untuk sanksinya sendiri, pelaksanaannya beragam, sanksi yang diterapkan fakultas hampir sama hanya saja pelaksanaannya yang beragam, karna sanksi diterapkan oleh masing-masing dosen dan beberapa dosen tidak menerapkan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar. Karena masih beragam dan masih tidak meratanya sanksi yang diberlakukan oleh dosen sehingga masih banyak mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada bulan April 2015, penulis melakukan penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi. Sedangkan Fakultas Bahasa Sastra dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Teknik tidak dijadikan objek penelitian karena Fakultas Bahasa Sastra dan Seni tidak memungkinkan menerapkan peraturan berpakaian disebabkan terbatasnya mahasiswa dalam berkreasi yang menyangkut perkuliahan seni, Fakultas Teknik tidak menerapkan peraturan berpakaian disebabkan banyak kegiatan praktek yang mengharuskan berpakaian sesuai dengan pakaian praktek agar sesuai dengan kebutuhan sendiri, sedangkan Fakultas Ilmu Keolahragaan tidak menerapkan aturan berpakaian semestinya disebabkan agar faktor kenyamanan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas matematika dan Ilmu

Pengetahuan tidak di jadikan tempat penelitian karena aturan berpakaian di Fakultas tersebut tidak ada.

Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, dalam penerapan etika berpakaian masih banyak ditemukan mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian di Fakultasnya masing-masing. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang “Implementasi Aturan Etika Berpakaian Di Lingkungan Kampus UNP (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak mahasiswa yang tidak mematuhi aturan berpakaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Masih belum merata penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar aturan etika berpakaian.
3. Beragamnya peraturan etika berpakaian dari beberapa Fakultas.
4. Masih banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berpakaian ketat baik celana maupun baju yang sesuai dengan *lifestyle* jaman sekarang.
5. Tidak semua dosen memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian yang telah ditetapkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi pembahasannya pada penerapan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus UNP pada Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu pendidikan, Fakultas Ekonomi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan aturan etika berpakaian mahasiswa di lingkungan kampus UNP belum terlaksana dengan baik ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan aturan berpakaian di lingkungan kampus UNP ?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dalam penerapan aturan berpakaian di lingkungan kampus UNP ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan aturan etika berpakaian di kampus UNP.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat penerapan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus UNP.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendorong penerapan aturan etika berpakaian di lingkungan kampus UNP.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara teori khususnya yang berkaitan dengan Formulasi kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- a. Peneliti, sebagai tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana.
- b. Mahasiswa Universitas Negeri Padang, diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa agar mampu mengikuti tata tertib dan aturan etika berpakaian agar terlaksana dengan baik dan penuh kesadaran.
- c. Universitas Negeri Padang, sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan etika berpakaian di lingkungan kampus.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A.Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Dalam kamus Webster (Solichin, 1997:64) dirumuskan secara pendek bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”, dengan demikian implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden).

Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo (2001:192) menjelaskan tentang konsep implementasi sebagai berikut:

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian,”

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting maupun keputusan badan peradilan.

Meter dan Horn (dalam Winarno, 2002:102) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2004:102) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Persons (2005:470), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Winarsih, 2008:36) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak tepat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Ripley dan Frangklin (dalam Winarno, 2007:145-146) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata.

Proses implementasi sesungguhnya tidak hanya mengungkapkan hal-hal apa yang terjadi setelah program diimplementasikan tetapi juga mencakup pilihan model implementasi, instrument implementasi, strategi implementasi serta program dengan operasionalnya.

Hinggis (dalam Harbani, 2010: 57), mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Menurut Gordon (dalam Harbani, 2010: 58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Lane (dalam Sabatier, 1986), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan. Hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. *Kedua*, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Haedar, 2010: 2).

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel atau diterima di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca atau setelah implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Dwiyanto, 2009: 143).

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses administrasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Haedar, 2010: 2).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan

publik. (Riant, 2009:494). Mazmanian dan Sebatier (1981:4) menjelaskan

“Proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan itu mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya, proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan. Kesediaan dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut.”

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan

sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dengan maksimal agar hasil pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2. Syarat Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Solichin, 2002:71-78) untuk dapat melaksanakan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. (10) Pihak-pihak yang

memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, (3) adanya hasil kegiatan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Gow dan Morss (dalam Harbani, 2010: 59) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat antara lain: (1) Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) Kelemahan institusi, (3) Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif, (4) Kekurangan dalam bantuan teknis, (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) Pengaturan waktu (*timing*), (7) Sistem informasi yang kurang mendukung, (8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) Dukungan yang berkesinambungan.

Turner dan Hulme (1997) semua hambatan tersebut dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan, dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah,

kelompok sasaran, kecendrungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (1993), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi. Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Berdasarkan dari beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan suatu kebijakan, beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan etika berpakaian dilingkungan kampus UNP yang pertama, hambatan dari lingkungan yang banyak dilihat mahasiswa masih banyak mengikuti gaya ala barat. Yang kedua, kurangnya partisipasi dosen dalam menerapkan aturan etika berpakaian dilingkungan kampus UNP dan masih banyak dosen tidak memberlakukan aturan etika berpakaian. Hambatan tersebut berasal dari luar kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada

proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan kondisi sosial budaya yang terjadi pada saat ini di kalangan mahasiswa.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor - faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk- petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber – sumber

Sumber - sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian - keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas - tugas mereka, wewenang dan fasilitas – fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan - kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi - konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi - organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Berdasarkan faktor pendukung dalam penerapan kebijakan maka yang sesuai dengan judul yang akan penulis teliti adalah komunikasi yaitu faktor kejelasan , aturan etika berpakaian dilingkungan beserta sanksi yang diterima jika melanggar kampus UNP harus jelas dan diketahui oleh semua mahasiswa. Faktor ketiga juga sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis mengenai

konsistensi, semua dosen konsisten menerapkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar aturan etika berpakaian dilingkungan kampus UNP.

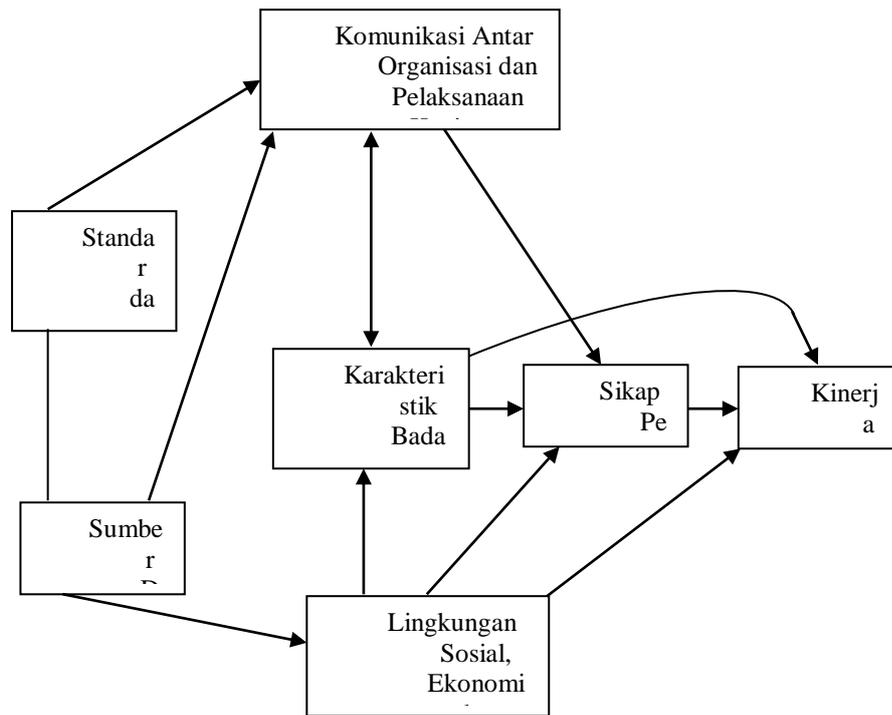
5. Model-model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan dari Mater dan Horn (dalam Dwiyanto, 2009: 38-41) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Mater dan Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard an sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik financial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan. Dalam contoh di muka disebutkan bahwa koordinasi antara kelompok pendamping, LKMD, Kepala Desa dan Aparat Desa telah berhasil meyakinkan dan menjelaskan dengan baik arti penting IDT, sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas program yang dijalankan.
5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Adapun model dari Van Meter dan Horn dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan–Van Meter dan VanHorn

Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti:

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana.

3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana.
4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana.
5. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
6. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana.
7. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
8. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana.
9. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

Hubungan yang saling terkait dan kompleks diatas memang amat dimungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, sehingga penelitian implementasi kebijakan seharusnya tidak dilihat sebagai penelitian yang sederhana. Penelitian implementasi kebijakan menjadi menarik jika dapat menggambarkan yang terjadi antar variabel yang (misalnya) terdapat dalam model Meter dan Horn ini. Gambaran yang utuh serta detil nantinya akan sangat menarik dan terlihat amat dinamis.

Model implementasi kebijakan publik yang ditemukan oleh George C. Edwards III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009: 31-33) menunjukkan empat

variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya financial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa

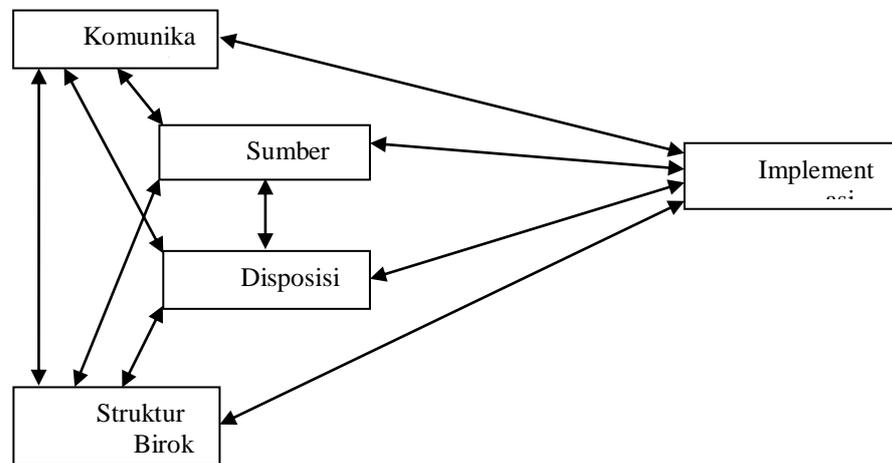
ada dukungan financial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi/kecendrungan, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline program*. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis yang akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak

berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanaanpun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up atau sasaran ke atas dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis dan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Implementasi Edward III

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

Dari beberapa model implementasi diatas maka dapat disimpulkan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/kecendrungan, dan struktur birokrasi.

Untuk memudahkan dalam menganalisis penerapan aturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang, maka penelitian ini selanjutnya menggunakan model Edwards III dengan tiga faktor yaitu, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi. Menurut penulis, model Edwards III lebih relevan digunakan dalam penelitian ini.

6. Ketentuan etika berpakaian berdasarkan keputusan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 119/UN35/AK/2011. Penetapan Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang

Pasal 11 yang tercantum pada bagian g dan h

g. mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku demi terbinanya suasana belajar dan mengajar yang kondusif, h. berpakaian rapi, sopan, dan tidak ketat, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam mengikuti proses pembelajaran dan di lingkungan kampus.

Ketentuan umum:

- a) Adab berpakaian harus sopan, bersih, dan rapi.
- b) Cara berpakaian harus mencerminkan kepribadian seorang mahasiswa dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya, setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Suatu keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya (Akong, 2000. www.google.com).

7. Ketentuan Etika Berpakaian Menurut Agama Islam

Sebagai seorang manusia, tentunya kita membutuhkan pegangan yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalan hidup diatas dunia ini yakni sesuatu yang kita yakini dan menjadi tuntunan. Bagi seorang muslim sendiri yang menjadi pedoman hidup yaitu alquran. Dalam islam pakaian merupakan

suatu keharusan dan kewajiban. Kewajiban menutup aurat ini tercantum dalam Qs : An-nur 31 dan Al-ahzab 59. Kriteria pakaian laki-laki dan perempuan menurut agama islam adalah :

Laki-laki :

- a. Pakaian yang digunakan menutup aurat dari pusat hingga lutut.
- b. Pakailah pakaian yang terbaik dan indah mata memandang
- c. Dilarang menyerupai pakaian perempuan

Perempuan :

- a. Pakaian yang digunakan menutup aurat yaitu menutup seluruh bentuk badan kecuali pergelangan tangan dan muka.
- b. Pakailah pakaian yang indah dan tidak mencolok mata.
- c. Memakai pakaian yang longgar dan tidak menarik perhatian.

8. Ketentuan Etika Berpakaian Menurut Adat Minang Kabau

Jati diri adalah kepibadian yang yang diukur dengan norma-norma, nilai-nilai adat, budaya dan agama (Islam), ia akan menjadi satu kesatuan bagi masyarakat dan akan terwujud dari cara berpikir dengan rasa. Aplikasi dari hal tersebut akan memperlihatkan jati diri seorang perempuan di Minangkabau. Salah satu bagian dalam melihat jati diri perempuan Minangkabau adalah dari perilaku mereka dalam berpakaian. Aturan berpakaian menurut adat Minangkabau sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam yaitu menutup aurat (dalam hal ini adalah baju kurung) dan pemakaiannya sesuai dengan keadaan dan tempat serta tidak menjolok dipandang mata.

Zulkamaini (1994:38) mengungkapkan bahwa, aturan dan acuan dalam berpakaian menurut budaya Minangkabau ialah menutup aurat sesuai dengan keadaan dan bentuk tubuh pemakainya, sesuai dengan keadaan dan tempat pemakaiannya serta tidak menyolok dipandang. Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Kamardi Rais Dt. Simulie (25-10-2007) bahwa aturan adat Minangkabau dalam berpakaian adalah mengacu kepada ajaran Islam yaitu “menutup aurat” dalam hal ini adalah baju kurung. Baju kurung yang dimaksud disini adalah lapang, dalam dan bukan ketat.

Kemudian Wisran Hadi (7-11-2007) menambahkan bahwa, standar pakaian orang Minangkabau, tidak menonjolkan bagian tubuh yang bisa menimbulkan ransangan seksual bagi lawan jenisnya, dalam hal ini adalah baju kurung, dan dalam pepatah adat disebut “Kain pandindiang miang, ameh pandindiang malu” (kain pendinding / pembatas miang, emas pendinding / penutup malu) artinya pakaian itu betul-betul menutup seluruh tubuh agar tidak terkena oleh bahaya alam dan Islam menegaskan tidak memberi ransangan seksual bagi lawan jenisnya, jadi adat dan agama sejalan, dalam hal ini adalah baju kurung, baju lapang, basiba.

Pemakaian pakaian adat Minangkabau ini diatur sedemikian rupa sehingga sesuatu itu diletakkan pada tempatnya secara wajar. Penempatan dengan wajar inilah yang mencerminkan jati diri seorang perempuan Minangkabau. Ketentuan adat dalam berpakaian terlihat sama dengan ketentuan Islam. Dalam tata cara berpakaian Islam menetapkan: 1). Pakaian harus menutup aurat yaitu, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan

sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang berarti, “ Hai Asma sesungguhnya seorang perempuan apabila telah cukup umur, tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan itu, seraya Rasulullah menunjukkan dengan isyarat pada muka dan telapak tangannya. (HR Abu Daud dan ‘Aisyah ra). 2). Tidak memperlihatkan bentuk tubuh, tidak tembus pandang, tidak menarik perhatian (Q. S.An-Nur 31 dan al-Ahzab 59. 3). Tidak seperti dandanan orang Jahiliyah Qs. Al-Ahzab, 33. 4). Tidak menyerupai pakaian lawan jenis (hadits) yang artinya “ Dari Abu hurairah ia berkata; “ Rasulullah Saw mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki (HR, Abu Daud).

Pengambilan teori ini karena pada umumnya mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berada di lingkungan minangkabau maka diambil teori adat minangkabau, dan mahasiswa UNP mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini saya mengkhususkan sebagai acuan agama islam dan adat minang saja. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori yang berhubungan dengan adat Minangkabau dan agama Islam.

9. Teori-Teori Dalam Etika

a. Paham hedonis

K. Bertens (1993:235) mengatakan hendonisme adalah baik apa yang memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kualitas kesenangan atau kekuatan dalam diri kita. Manusia merasa tertarik akan kesenangan dan apabila tercapai maka ia tidak akan mencari sesuatu lagi. menurut aristoteles dalam K.Bertens (1993:236) kesenangan itu bersifat badani belaka, karena

hakikatnya, tidak lain adalah gerak dalam badan, ia menekan lagi bahwa kesenangan harus dimengerti sebagai kesenangan aktual bukan kesenangan masa lampu atau masa depan, akan tetapi ada batas untuk mencari kesenangan, ada perlunya pengendalian diri, yang penting adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa olehnya, sebagaimana dalam menggunakan pakaian.

b. Paham eudemonisme

Berasal dari filsuf Yunani besar, Aristoteles (384-322SM). Menurut Aristoteles dalam K. Bertens, (1993:242) menegaskan bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar tujuan, bisa dikatakan juga dalam setiap perbuatan, kita ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita.

Lebih lanjut Aristoteles mengatakan seseorang mencapai tujuan teratur dengan menjalankan fungsinya dengan baik, jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, ia juga akan mencapai tujuan terakhirnya, atau kebahagiaan. Fungsinya sebagai manusia adalah akal, budi, atau rasio. Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan rasio. Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan rasionalnya, dan tidak cukup melakukan beberapa kali saja, tapi harus sebagai suatu sikap tetap. Jadi menurut Aristoteles, dalam K. Bertens, (1993:244) manusia adalah baik dalam arti moral jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan moralnya, dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektual.

c. Paham Deontologi

Menurut K. Bertens (1993:254) deontologi merupakan suatu sistem etika yang tidak mengukur baik atau tidaknya perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, deontologi tidak menyoroiti tujuan yang dipilih dari perbuatan itu, tapi semata-mata wajib tidaknya perbuatan atau keputusan itu.

Lebih lanjut deontologi menurut I Kant dalam K. Bertens (1993:254) bertindak sesuai dengan kewajiban disebut legalitas, dengan legalitasnya kita memenuhi norma hukum, tidak penting motifnya apa, tetapi itu belum memenuhi norma moral jika melakukan perbuatan semata-mata karena hormat kepada hukum (kewajiban moral).

Dalam pemikiran I Kant ini, menyimpulkan otonomi kehendak, bukan heteronom. Kehendak otonom, bila menentukan dirinya sendiri, sedang heteronom, ditentukan oleh faktor dari luar dirinya, seperti kecenderungan atau emosi. Dengan adanya otonomi kehendak penguasa, I Kant menemukan kebebasan manusia, kebebasan untuk terlepas dari penguasa, atau instansi lain, namun, menurut Kant dalam K. Bertens (1993:257) kebebasan tidak berarti bebas dari segala ikatan, sebaliknya, manusia itu itu bebas dengan mentaati hukum moral, kehendak yang menundukan diri kepada hukum moral.

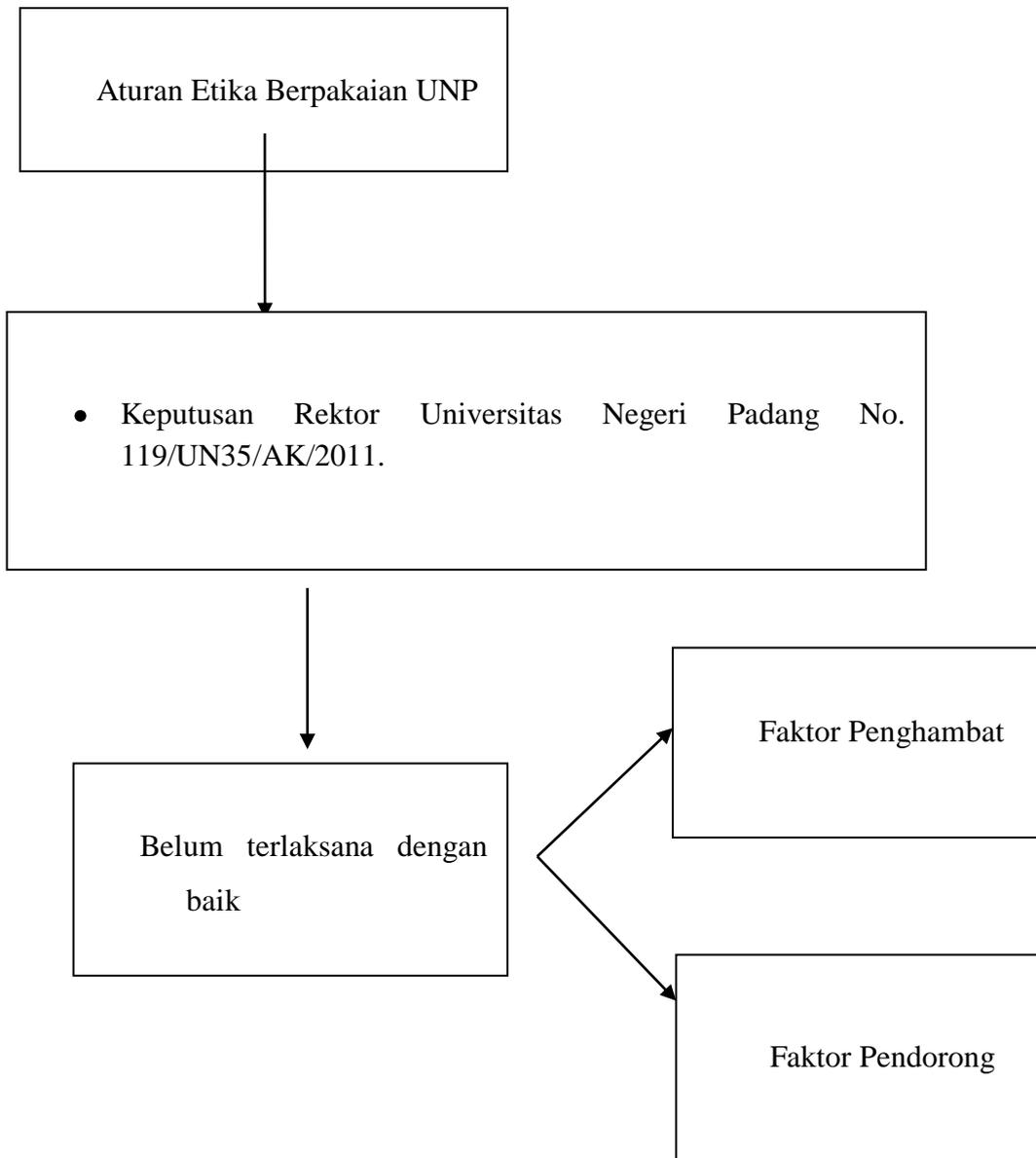
d. Unsur-unsur pokok dalam etika

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam etika menurut Supriadi (1983:22) adalah:

- 1) Nilai-nilai adalah sesuatu yang sangat penting, atau yang patut dikejar. Nilai adalah sesuatu yang dicita-citakan yang ideal, yang oleh karenanya diusahakan atau dihargai.
- 2) Norma merupakan suatu peraturan yang membatasi kebebasan dan gerak manusia, norma juga pada umumnya bersifat larangan. Tetapi disamping itu, dapat pula diartikan sebagai patokan, dasar ataupun ukuran
- 3) Situasi itu jaringan hubungan-hubungan antara orang-orang yang terlibat satu dengan yang lain, dalam suatu peristiwa atau usaha dan kegiatan tertentu, ikatan antara mereka selalu mengandung unsur-unsur moral (tanggung jawab kewibawaan, kesadaran, ketaatan, hutang budi dan lain-lain) yang timbul dalam tiap hubungan antar manusia.

Gambar 3. Kerangka Konseptual

A. Kerangka konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dibuat beberapa kesimpulan bahwa:

1. Penerapan aturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang fakultas yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini yaitu, Fakultas Ilmu Sosial masih belum terlaksana dengan baik, dilihat dari masih ada mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Fakultas Ilmu Pendidikan sudah hampir semua mahasiswa nya berpakaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan Fakultas Ekonomi tidak semua mahasiswa berpakaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Faktor yang menjadi sebuah penghambat dalam pelaksanaan peraturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang adalah faktor lingkungan baik dari luar maupun dari dalam, seperti masih banyak ,mahasiswa yang berpakaian hanya sesuai dengan trend yang ada. Faktor kurangnya partisipasi dari dosen dalam menerapkan aturan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan aturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang.
3. Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan aturan berpakaian komunikasi antara pihak yang membuat kebijakan dan pihak yang menjadi pelaksana kebijakan. Faktor kedua, faktor kejelasan mengenai aturan

berpakaian dilingkungan kampus, fakto ketiga, konsistensi dari semua pihak dalam menerapkan aturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Diharapkan konsistensi semua pihak dalam menerapkan aturan berpakaian dilingkungan kampus Universitas Negeri Padang agar bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.
2. Bagi mahasiswa diharapkan kesadaran mahasiswa itu sendiri terhadap cara berpakaian yang baik dilingkungan kampus dan manfaatnya bagi mahasiswa itu sendiri.